



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN



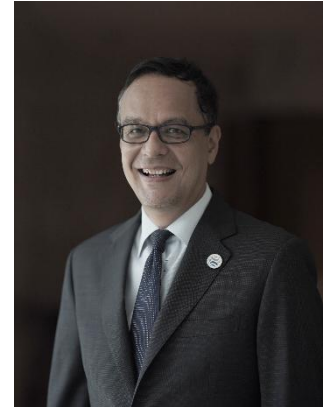
LAPORAN KINERJA 2024

DEPUTI BIDANG KOORDINASI
KONEKTIVITAS

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat, bimbingan, dan karunia-Nya Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024.

Laporan ini merupakan laporan capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas selama bulan Oktober s.d. Desember tahun 2024 dalam rangka menunjang pencapaian tugas dan fungsi. Laporan ini juga merupakan salah satu amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi dan disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas terdiri dari Sekretariat Deputy dan Lima Asisten Deputy, yaitu Asisten Deputy Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah, Asisten Deputy Konektivitas Darat dan Perkeretaapian, Asisten Deputy Konektivitas Maritim dan Udara, Asisten Deputy Konektivitas Berkelanjutan, dan Asisten Deputy Sarana dan Prasarana Pendukung Konektivitas.

Pelaksanaan kegiatan dan pembuatan laporan ini tidak lepas dari bantuan pihak terkait. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak terkait atas bantuannya dalam rangka pelaksanaan dan penyusunan laporan kinerja ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna dan masih ada kekurangan. Oleh karena itu, diharapkan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan kualitas pelaporan ke depan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Januari 2025
Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas,

Ttd.

Odo R.M. Manuhutu

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas Tahun 2024 disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas selama masa transisi Oktober hingga Desember 2024. Fokus utama pada periode ini adalah penataan internal organisasi dan pemetaan sumber daya manusia (SDM), seiring dengan pembentukan struktur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 dan Permenko Nomor 1 Tahun 2024. Upaya membangun fondasi organisasi yang solid dilakukan melalui penyusunan struktur organisasi, pelantikan pejabat eselon I dan II, serta penempatan pegawai fungsional dan staf pendukung. Hingga akhir 2024, Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas memiliki 50 pegawai yang terdiri dari 40 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 10 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Selain penataan internal, koordinasi awal dengan stakeholder strategis, khususnya Kementerian Perhubungan, juga dilakukan untuk mengidentifikasi isu-isu prioritas. Hasil koordinasi ini menghasilkan pengawalan terhadap sejumlah isu strategis yang meliputi persiapan moda angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025, penurunan harga tiket pesawat, rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya, revitalisasi Bandara I Gusti Ngurah Rai, persiapan *Bali International Air Show* 2025, dan pengembangan industri bahan bakar penerbangan yang berkelanjutan (*Sustainable Aviation Fuel/SAF*).

Dalam menghadapi lonjakan perjalanan Nataru yang diperkirakan mencapai 110,67 juta perjalanan, pemerintah melakukan antisipasi terhadap potensi kepadatan di jalur utama dan simpul transportasi. Pengawasan dilakukan di sejumlah titik strategis, seperti Pelabuhan Tanjung Priok, Stasiun Pasar Senen, Pelabuhan Merak-Bakauheni, Bandara Soekarno-Hatta, dan Terminal Pulo Gebang. Sementara itu, intervensi pemerintah untuk menekan harga tiket pesawat dilakukan melalui penurunan tarif PJP4U dan PJP2U sebesar 50% serta pengurangan harga avtur di 19 bandara utama, yang diatur melalui Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 150 Tahun 2024. Kebijakan ini berhasil menurunkan harga tiket secara signifikan selama periode Nataru.

Di sisi lain, proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya yang bertujuan meningkatkan efisiensi konektivitas antarwilayah sedang dalam tahap pembahasan teknis, termasuk kajian trase terbaik dan studi kelayakan lanjutan.

Upaya revitalisasi Bandara Ngurah Rai dilakukan untuk mengatasi kelebihan kapasitas yang diprediksi terus meningkat hingga 2044, dengan fokus pada perluasan terminal dan modernisasi sistem layanan. Di sektor aviasi, pengembangan SAF menjadi langkah strategis mendukung target pengurangan emisi CO₂ nasional, melalui kolaborasi lintas sektor untuk mengamankan bahan baku dan membangun strategi advokasi.

Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas pada tahun 2024 berasal dari sisa pagu Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves. Pagu anggaran per Oktober-Desember 2024 Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas sebesar Rp1.275.855.765 dengan realisasi mencapai Rp1.199.556.213 atau 94% dari pagu.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR GAMBAR	IV
DAFTAR TABEL	V
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas dan Fungsi.....	1
B. Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas	2
C. Sumber Daya Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas.....	5
1. Sumber Daya Manusia.....	5
2. Sumber Daya Keuangan.....	5
D. Sistematika Penyajian	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
A. Perencanaan Program dan Kegiatan.....	7
B. Penataan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Perencanaan Anggaran	7
C. Identifikasi Isu Strategis Konektivitas.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
A. Capaian Kinerja <i>Quick Win</i> Tahun 2024	10
B. Realisasi Anggaran	19
C. Kondisi Sumber Daya Pegawai	20
BAB IV PENUTUP	22
A. Kesimpulan	22
B. Langkah Perbaikan Kedepan	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas	2
Gambar 2. Intervensi Kebijakan Penurunan Harga Tiket Pesawat Masa Nataru	14
Gambar 3. Usulan Rute Kereta Cepat Jakarta - Surabaya.....	15
Gambar 4. Rerata penumpang yang dilayani oleh Trans Metro Dewata per tahun.....	17
Gambar 5. Rencana Pengembangan Fasilitas Terminal Bandara DPS.....	17
Gambar 6. Bali International Airshow (BIAS) 2025	18
Gambar 7. Peta Jalan dan Tiga Tujuan Utama Pengembangan SAF Indonesia	19

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pagu Anggaran Tahun 2024	5
Tabel 2. Pagu Awal Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas 2024	8
Tabel 3. Kapasitas Angkut Nasional Kapal PELNI per 2024.....	15
Tabel 4. Koridor, trayek, dan armada Trans Metro Dewata	16
Tabel 5. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Tahun 2024.....	20
Tabel 6. Daftar Pegawai yang menjalani Tugas Belajar	21

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja (LKj) Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan transparansi kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode Oktober - Desember tahun 2024. Laporan ini menjelaskan pelaksanaan *quick wins* Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas pada tahun 2024. Program *quick wins* Deputy Bidang Konektivitas mendukung visi dan misi Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden meliputi penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi.

Merujuk Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas terdiri dari Sekretariat Deputy dan Lima Asisten Deputy, yaitu; Asisten Deputy Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah, Asisten Deputy Konektivitas Darat dan Perkeretaapian, Asisten Deputy Konektivitas Maritim dan Udara, Asisten Deputy Konektivitas Berkelanjutan, dan Asisten Deputy Sarana dan Prasarana Pendukung Konektivitas.

A. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang konektivitas. Tugas tersebut dilaksanakan untuk memberikan dukungan, koordinasi pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden secara inklusif dan terintegrasi. Dalam melaksanakan tugas, Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas menyelenggarakan fungsi:

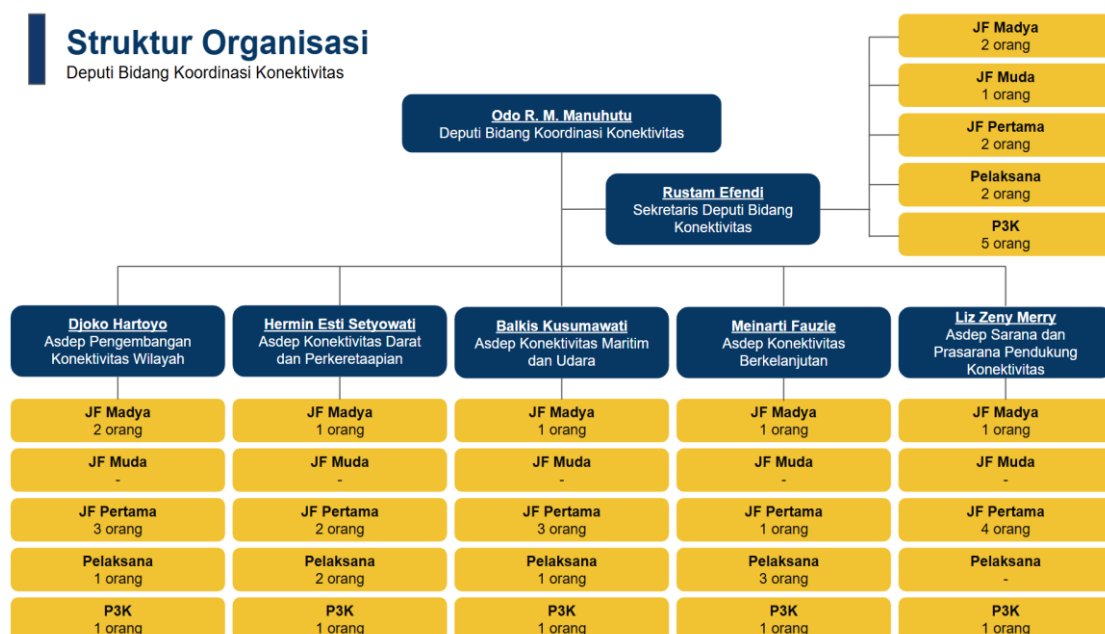
1. Sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang konektivitas;
2. Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang konektivitas;

3. Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang konektivitas;
4. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang konektivitas;
5. Pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

B. Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas

Susunan organisasi Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas berdasarkan Permenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 terdiri atas:

1. Sekretariat Deputy;
2. Asisten Deputy Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah;
3. Asisten Deputy Konektivitas Darat dan Perkeretaapian;
4. Asisten Deputy Konektivitas Maritim dan Udara;
5. Asisten Deputy Konektivitas Berkelanjutan;
6. Asisten Deputy Sarana dan Prasarana Pendukung Konektivitas.



Gambar 1. Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas

1. Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas

Mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Deputy menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a) koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
- b) koordinasi pemantauan, analisis dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja;
- c) pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi;
- d) pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, kearsipan, dan keuangan;
- e) pemberian dukungan layanan pimpinan, pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan barang milik negara;
- f) koordinasi penyusunan laporan; dan
- g) koordinasi dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi.

2. Asisten Deputi Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah

Mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan konektivitas antar wilayah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Deputi Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan konektivitas antar wilayah;
- b) penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan konektivitas antar wilayah; dan
- c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan konektivitas antar wilayah.

3. Asisten Deputi Konektivitas Darat dan Perkeretaapian

Mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda Pembangunan nasional di bidang konektivitas darat dan perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Deputi Konektivitas Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang konektivitas darat dan perkeretaapian;
- b) penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang konektivitas darat dan perkeretaapian; dan

- c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang konektivitas darat dan perkeretaapian.

4. Asisten Deputi Konektivitas Maritim dan Udara

Mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang konektivitas maritim dan udara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Deputi Konektivitas Maritim dan Udara menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang konektivitas maritim dan udara;
- b) penyiapan pelaksanaan kebijakan pengendalian kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang konektivitas maritim dan udara; dan
- c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang konektivitas maritim dan udara.

5. Asisten Deputi Konektivitas Berkelanjutan

Mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang konektivitas berkelanjutan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Deputi Konektivitas Berkelanjutan menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang konektivitas berkelanjutan;
- b) penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang konektivitas berkelanjutan; dan
- c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang konektivitas berkelanjutan.

6. Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Pendukung Konektivitas

Mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang sarana dan prasarana pendukung konektivitas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Pendukung Konektivitas menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang sarana dan prasarana pendukung konektivitas;
- b) penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang sarana dan prasarana pendukung konektivitas; dan
- c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana pendukung konektivitas.

C. Sumber Daya Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas

1. Sumber Daya Manusia

Sejak ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan Permenko Nomor 1 Tahun 2024, Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas sampai dengan saat ini memiliki 50 pegawai yang terdiri dari PNS berjumlah 40 pegawai dan Non PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan jumlah 10 pegawai.

Jumlah pegawai Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas berdasarkan jabatan dari jumlah PNS 40 pegawai dengan rincian sebagai berikut: Jabatan Pimpinan Tinggi Madya berjumlah satu orang pegawai; Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berjumlah enam pegawai; Fungsional Madya berjumlah delapan pegawai; Fungsional Muda berjumlah satu pegawai; Fungsional Pertama berjumlah 14 pegawai; Pelaksana berjumlah 10 pegawai dan Calon PPPK 10 Orang.

2. Sumber Daya Keuangan

Pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan TA. 2024 berasal dari pagu anggaran dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) yang telah disahkan dengan DIPA Induk Nomor: SP-DIPA-120.01-0/2024. Pagu yang dapat digunakan adalah sisa pagu Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode Januari-September 2024. Sehingga pagu Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas pada periode Oktober-Desember 2024 sebesar Rp2.110.620.196 yang terdiri dari Program Dukungan Manajemen sebesar Rp834.764.431 dan Program Koordinasi Kebijakan sebesar Rp1.275.855.765.

Tabel 1. Pagu Anggaran Tahun 2024

Program	Pagu Awal	Realisasi	Sisa (Pagu Awal Deputy Konektivitas)
Koordinasi Kebijakan	13.300.000.000	12.024.144.235	1.275.855.765
Dukungan Manajemen	2.200.000.000	1.365.235.569	834.764.431

D. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian laporan kinerja ini adalah sebagai berikut.

1. Bab I: Pendahuluan.

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi, organisasi, peran strategis, serta sistematika penyajian.

2. Bab II: Perencanaan Kinerja.

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana program dan kegiatan serta anggaran tahun 2024, serta diuraikan mengenai pengukuran kinerja organisasi.

3. Bab III: Akuntabilitas Kinerja.

a) Realisasi kinerja Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas

Pada subbab ini diuraikan realisasi kinerja Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas berdasarkan *quick win* yang telah ditetapkan dalam mendukung prioritas pemerintah dan RPJMN.

b) Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dalam mendukung tercapainya kinerja yang telah ditetapkan.

4. Bab IV: Penutup.

Menyajikan kesimpulan atas pencapaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas tahun 2024 dan menguraikan kendala serta rencana tindak lanjut yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Program dan Kegiatan

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan merupakan kementerian baru yang dibentuk pada Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto yang diumumkan pada 20 Oktober 2024. Lebih lanjut, tugas dan fungsi Kementerian diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Berdasarkan Perpres, Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terdiri dari empat unit kerja Deputi dan mengoordinasikan lima Kementerian, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan. Sehubungan dengan hal tersebut, proses perencanaan kinerja pada Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan secara khusus pada Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas mengacu pada pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai Perpres yakni melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian agenda pembangunan di bidang konektivitas.

Proses perencanaan kinerja pada tahun 2024 merupakan proses transisi penataan organisasi dan sumber daya dari Kemenko Kemaritiman dan Investasi menjadi Kemenko Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan dan Kemenko Pangan. Pada proses penataan organisasi dilakukan melalui koordinasi internal di lingkup Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan koordinasi dengan Kementerian PANRB dan BKN. Selain itu, pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas telah dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dengan stakeholder di bawah koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas, utamanya Kementerian Perhubungan. Berdasarkan serangkaian koordinasi awal, telah diidentifikasi sejumlah isu strategis dan prioritas untuk dituntaskan pada tahun 2024.

B. Penataan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Perencanaan Anggaran

Tahap awal yang dilakukan dalam penataan organisasi adalah dengan menyusun struktur organisasi dan rumusan tugas dan fungsi melalui serangkaian koordinasi internal lingkup Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan Kementerian PANRB. Sebagai tindak lanjut penjabaran dari Perpres 145 Tahun 2024, telah disusun

Peraturan Menteri Koordinator Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Berdasarkan penataan organisasi kementerian negara, tugas dan fungsi serta sumber daya Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi didistribusikan ke Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan Kementerian Koordinator Pangan. Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan serangkaian koordinasi dalam penataan sumber daya manusia di lingkup Kementerian Koordinator dan pendistribusiannya di tiap unit kerja.

Penataan sumber daya manusia diawali dengan penugasan Pejabat Pimpinan Madya dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Madya di lingkup Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Selanjutnya diikuti dengan penempatan pegawai fungsional madya, muda, dan pertama serta pelaksana melalui penetapan internal.

Berdasarkan arahan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, penggunaan anggaran untuk Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menggunakan DIPA Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi dengan dilakukan penyesuaian nomenklatur dan output yang dihasilkan. Proses penyesuaian penggunaan anggaran dilakukan melalui *trilateral meeting* bersama Kementerian PPN/BAPPENAS dan Kementerian Keuangan. Adapun pagu anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2025 berdasarkan DIPA Nomor: SP DIPA - 132.01.1.694776/2025 tanggal 2 Desember 2024 yang terdiri dari Program Pelaksanaan Kebijakan sebesar Rp13.110.165.000 dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1.650.000.000. Selanjutnya berdasarkan realisasi per Januari-September diperoleh sisa pagu sebesar Rp2.110.620.196 yang selanjutnya menjadi pagu Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas. Adapun rincian pagu berdasarkan program sebagai berikut:

Tabel 2. Pagu Awal Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas 2024

Program	Pagu Awal	Realisasi	Sisa (Pagu Awal Deputy Konektivitas)
Koordinasi Kebijakan	13.300.000.000	12.024.144.235	1.275.855.765
Dukungan Manajemen	2.246.000.000	1.365.235.569	834.764.431
Total			2.110.620.196

Sumber: DIPA 2024

C. Identifikasi Isu Strategis Konektivitas

Pelaksanaan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas pada tahun 2024 belum merujuk pada Perjanjian Kinerja dan dokumen Renstra, sehingga perencanaan kinerja pada masa transisi berdasarkan quick wins 100 hari Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta identifikasi isu strategis dan prioritas yang terkait dengan bidang

konektivitas. Stakeholder utama pada isu konektivitas adalah Kementerian Perhubungan, oleh karena itu koordinasi awal yang dilakukan adalah melakukan audiensi dengan unit kerja di lingkup Kementerian Perhubungan.

Adapun program yang menjadi quick wins dalam 100 hari yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo ke Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah sebagai berikut:

1. Mendukung rencana strategis Presiden (Perpres RPJMN) untuk sektor infrastruktur dan pengembangan wilayah untuk tahun 2024-2029 sesuai dengan visi dan misi presiden terpilih dan Janji Presiden.
2. Menyusun Daftar Proyek Strategis Nasional (Perpres Program Strategis) untuk sektor Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tahun 2024-2029.
3. Percepatan pengembangan organisasi Kementerian Koordinator, antara lain:
 - a) Membentuk tim persiapan (Kepmenko Pokja Persiapan Kemenko).
 - b) Penyusunan Perpres SOTK tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kemenko.
 - c) Penyusunan Perpres Tunjangan Kinerja tentang tunjangan kinerja pegawai.
 - d) Percepatan rekrutmen dan penempatan sumber daya manusia, baik pegawai maupun pejabat kementerian.
4. Mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran 2024 dan menyelaraskan program yang sedang berjalan sesuai dengan visi dan misi.
5. Persiapan lebih awal untuk menghadapi tantangan beban puncak infrastruktur seperti: *long weekend*, libur Natal dan Tahun Baru 2024, libur lebaran 2025, ancaman banjir dan longsor akibat La Nina pada akhir 2024 hingga awal 2025, dan lain sebagainya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Tahun 2024 merupakan tahun pertama Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas sejak diumumkannya Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo pada 20 Oktober 2024. Oleh karena itu, pada 2024 belum ada dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang dijadikan acuan dalam pertanggungjawaban kinerja. Akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas didasarkan pada capaian *quick wins* Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan penyelesaian isu strategis bidang konektivitas pada 2024.

Selama kurun waktu kurang dari tiga bulan, fokus utama Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan termasuk Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas adalah penataan organisasi. Hal ini mencakup penyusunan struktur organisasi dan tata kerja, pemetaan sumber daya manusia, dan penganggaran. Adapun pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan yang terkait dengan konektivitas dilakukan dengan melakukan audiensi ke Kementerian/Lembaga yang menjadi stakeholder utama yakni Kementerian Perhubungan. Berdasarkan audiensi, telah diidentifikasi sejumlah isu utama sektor konektivitas yang akan diselesaikan pada kurun 2024 dan jangka panjang selama lima tahun ke depan.

A. Capaian Kinerja *Quick Win* Tahun 2024

Sesuai dengan arahan Presiden dan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terkait *quick wins* yang akan diselesaikan pada 2024 adalah pengelolaan sarana dan prasarana transportasi menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Terkait hal ini terdapat dua isu utama yang dikoordinasikan oleh Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas yaitu penyiapan moda angkutan dan antisipasi kepadatan lalu lintas, serta penyesuaian harga tiket pesawat agar lebih terjangkau.

Selain itu Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas juga telah melakukan identifikasi isu strategis terkait konektivitas bersama stakeholder utama yaitu Kementerian Perhubungan. Adapun rincian pelaksanaan program koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian selama 2024 sebagai berikut:

1. Persiapan Moda Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025

Periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025 diprediksi mengalami lonjakan pergerakan masyarakat hingga 110,67 juta perjalanan. Moda transportasi yang dominan digunakan adalah kendaraan pribadi, seperti mobil dan sepeda motor. Kondisi ini

mendorong pemerintah untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas di jalur-jalur utama, simpul transportasi seperti terminal, bandara, pelabuhan, dan stasiun, serta menghadapi potensi gangguan cuaca ekstrem.

Permasalahan utama yang dihadapi selama periode Nataru adalah lonjakan penumpang yang berpotensi menyebabkan kemacetan parah, penumpukan di simpul transportasi, dan meningkatnya risiko keselamatan. Di sektor darat, kepadatan lalu lintas di terminal dan akses jalan menuju pelabuhan menjadi perhatian khusus. Di sektor udara, tantangan meliputi operasional bandara selama 24 jam, serta mitigasi dampak aktivitas vulkanik. Sementara itu, di sektor perkeretaapian, kesiapan perlintasan sebidang yang rawan macet dan longsor menjadi fokus utama.

Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas telah melakukan pemantauan di beberapa titik atau simpul strategis dalam arus angkutan natal dan tahun baru. Adapun hasil pemantauan sebagai berikut:

a) Pelabuhan Tanjung Priok

Lonjakan penumpang libur Nataru 2024/2025 di Pelabuhan Tanjung Priok diperkirakan akan terjadi pada tanggal 21 - 24 Desember 2024. Data per 20 Desember 2024, total sebanyak 192 penumpang, dan 99 kendaraan. Hal yang menjadi perhatian khusus adalah cuaca ekstrem yang diprediksi BMKG akan berlangsung selama periode Nataru 2024/2025.

Posko Terpadu Nataru, bekerja sama dengan TNI AL, Kepolisian, dan Basarnas telah menyusun *contingency plan* sesuai SOP yang berlaku untuk mitigasi kecelakaan atau keadaan darurat pada angkutan kapal. Empat kapal navigasi telah disiagakan untuk melakukan patroli guna mendukung penanggulangan kecelakaan di laut di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok.

b) Stasiun Pasar Senen

Jumlah kenaikan volume penumpang di Stasiun Pasar Senen dimulai sejak 19 Desember 2024 dan akan diprediksi akan kembali normal pada 31 Desember 2024 atau 1 Januari 2025. Hingga 20 Desember 2024, realisasi penumpang dari DAOP 1 Jakarta yang telah membeli tiket kereta api sebanyak 3.735.000 penumpang, sedangkan total penumpang saat ini mencapai 17.000 penumpang. Adapun puncak arus berangkat diprediksi akan terjadi pada 24 Desember 2024 dengan perkiraan sebanyak 18.000 penumpang dengan mayoritas tujuan akhir Yogyakarta dan Solo.

c) Pelabuhan penyeberangan Merak-Bakauheni

Arus pergerakan periode Nataru 2024/2025 pada 3 pelabuhan utama Merak, Ciwandan dan Bandar Bakau Jaya dimulai pada 20-21 Desember 2024. Adapun puncaknya diperkirakan pada tanggal 29-30 Desember 2024 dengan perkiraan sejumlah 12.050 dan 13.224 kendaraan kecil. Pergerakan arus balik diperkirakan terjadi pada 1 Januari 2025. Adapun total kapasitas harian di Pelabuhan Merak - Bakauheni hingga 242.000 penumpang, serta 37.325 kendaraan kecil (Pelabuhan Merak) dan 38.218 kendaraan kecil (Pelabuhan Bakauheni).

d) Bandara Soekarno-Hatta

Terdapat dua lokasi pemantauan posko nataru di Bandara Soekarno - Hatta yaitu Kantor Otoritas Bandara Soekarno Hatta dan Terminal 1B. Hingga 19 Desember 2024, tercatat sebanyak 1.136 pergerakan pesawat di Bandara Soekarno Hatta. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 11% dibandingkan tahun 2019. Selain itu, *recovery rate* dari masa pra covid (2019) jumlah penumpang telah mencapai 100%, dengan kenaikan sebesar 23% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut diantaranya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terkait penurunan harga tiket pesawat sebesar 10%.

Kantor Otorita Bandara bersama maskapai penerbangan telah melakukan koordinasi terkait potensi cuaca ekstrim dan bencana seperti: penyampaian informasi keterlambatan melalui SMS *blast/broadcast*, pemberian kompensasi sesuai dengan Permenhub Nomor 89 Tahun 2015, dan jika terjadi kondisi darurat dapat dilakukan pendaratan di bandara Sultan Mahmud Badarudin Palembang, Yogyakarta International Airport, dan Kertajati.

e) Terminal Pulo Gebang

Terminal Pulo Gebang setiap harinya melayani hingga 1500 bus, terutama untuk perjalanan jarak jauh. Pada Nataru, Pemprov DKI mengeluarkan izin insidentil bagi armada tambahan untuk menghadapi lonjakan penumpang. Selain itu, terminal menyediakan ruang tunggu tambahan dengan kapasitas 1.000 orang.

Peningkatan keselamatan operasional dilakukan melalui *ramp check* yang meliputi pemeriksaan dokumen kendaraan, bagian luar, dan bagian dalam bus. Terminal juga dilengkapi dengan sistem informasi darurat. Pengumuman akan disampaikan oleh *announcer* jika terjadi cuaca ekstrem atau bencana alam, memberikan informasi langsung kepada penumpang

Rencana Tindak Lanjut meliputi penguatan koordinasi antar instansi untuk memastikan kelancaran mobilitas nasional, serta evaluasi program mudik gratis untuk

menekan angka kecelakaan kendaraan roda dua. Pemerintah juga akan melakukan penambahan kapasitas armada, optimalisasi rest area, dan pengaturan rekayasa lalu lintas di jalur utama. Selain itu, pemerintah berkomitmen menjaga tingkat kepuasan layanan di atas 90% dengan melakukan perbaikan sejumlah layanan dan program.

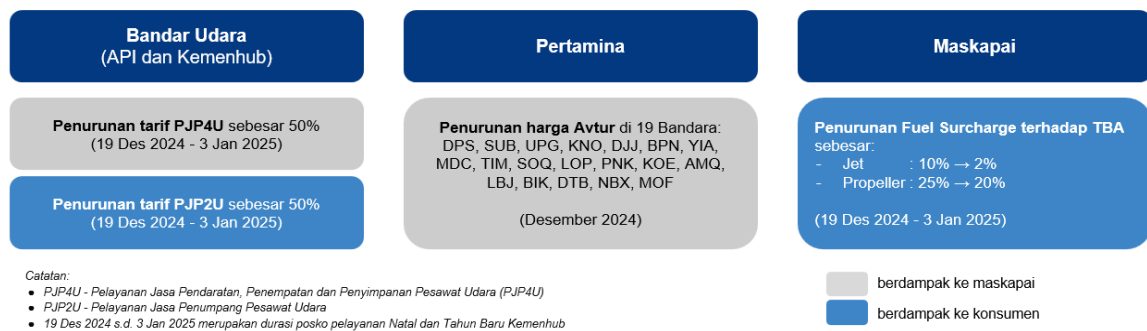
2. Penurunan Harga Tiket Pesawat

Harga tiket pesawat domestik di Indonesia masih menjadi perhatian masyarakat karena cenderung tinggi, terutama pada musim liburan dan periode tertentu seperti Nataru. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas transportasi udara bagi seluruh lapisan masyarakat. Aksesibilitas yang terbatas dapat menghambat mobilitas, perdagangan, dan pariwisata, sehingga menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan.

Beberapa faktor yang menyebabkan mahalnya harga tiket meliputi tingginya biaya operasional maskapai, harga avtur yang fluktuatif, serta tingginya komponen biaya seperti tarif bandara dan pajak. Dinamika *supply-demand* juga menjadi penyebab signifikan, terutama ketika permintaan melonjak. Selain itu, keterbatasan armada maskapai di rute-rute tertentu meningkatkan tekanan harga, ditambah dengan adanya komponen biaya seperti leasing armada, asuransi, dan biaya navigasi yang turut memperberat beban maskapai.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah mengambil langkah intervensi jangka pendek untuk menekan harga tiket selama periode Nataru 2024/2025. Kebijakan ini meliputi penurunan tarif PJP4U dan PJP2U sebesar 50%, serta pengurangan harga avtur di 19 bandara utama. Penyesuaian fuel surcharge juga dilakukan dengan mengurangi tarif untuk pesawat jet dari 10% menjadi 2% dan pesawat propeller dari 25% menjadi 20%. Kebijakan ini diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 150 Tahun 2024, yang bertujuan mengurangi beban operasional maskapai agar harga tiket lebih terjangkau bagi konsumen.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pengelola bandara yang berada di bawah naungan Kemenhub dan Angkasa Pura untuk menyesuaikan tarif layanan selama masa Nataru. Melalui intervensi ini, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara ketersediaan armada dan permintaan penumpang. Upaya ini juga diiringi dengan penguatan koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, dan entitas terkait untuk memastikan penerapan kebijakan berjalan efektif.



Gambar 2. Intervensi Kebijakan Penurunan Harga Tiket Pesawat Masa Nataru

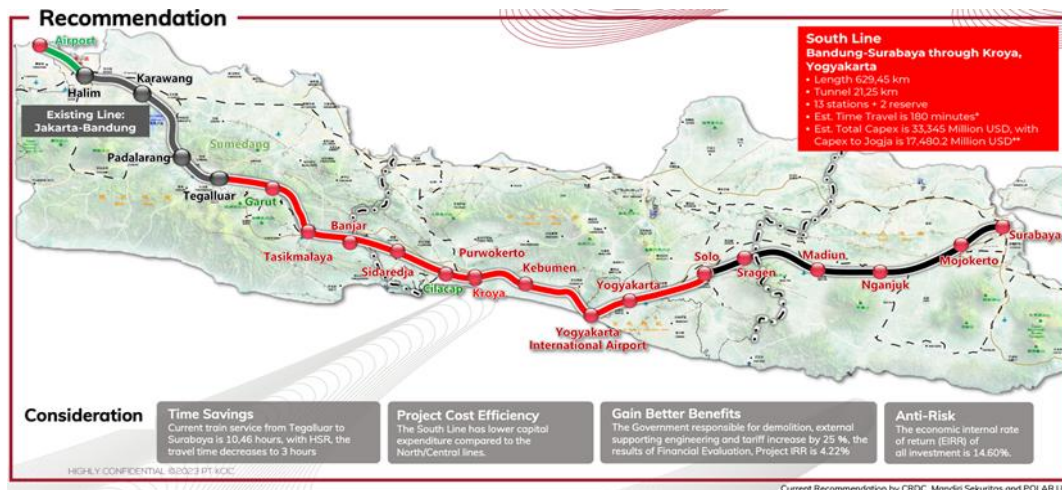
Rencana Tindak Lanjut Evaluasi keberhasilan intervensi jangka pendek selama periode Nataru menjadi landasan utama untuk merancang solusi jangka panjang. Pemerintah akan mengkaji kemungkinan penyesuaian regulasi terkait batas tarif dan meningkatkan efisiensi operasional maskapai melalui optimalisasi rute dan modernisasi armada. Selain itu, kolaborasi dengan penyedia bahan bakar seperti Pertamina akan diperkuat untuk menjaga kestabilan harga avtur.

Upaya jangka panjang akan difokuskan pada peningkatan daya saing industri penerbangan domestik, termasuk pengembangan infrastruktur bandara, diversifikasi rute penerbangan, dan penyediaan insentif fiskal bagi maskapai yang membuka rute baru di daerah tertinggal. Diharapkan, kombinasi intervensi jangka pendek dan strategi jangka panjang dapat menciptakan ekosistem penerbangan yang lebih efisien dan terjangkau.

3. Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya merupakan bagian dari Rencana Induk Perkeretaapian Nasional yang bertujuan meningkatkan efisiensi konektivitas antarwilayah. Diharapkan, proyek ini dapat mempersingkat waktu tempuh antara Jakarta dan Surabaya, sekaligus mengurangi ketergantungan pada transportasi darat berbasis kendaraan pribadi.

Pengembangan proyek saat ini masih dalam tahap pembahasan teknis. Isu yang muncul meliputi studi kelayakan lanjutan, pemilihan trase terbaik, serta kebutuhan penyelarasan regulasi antarinstansi. Keterbatasan koordinasi antarlembaga juga menjadi tantangan dalam mempercepat realisasi proyek ini. PT KCIC sedang mengkaji berbagai opsi trase, sementara Kementerian Perhubungan melakukan diskusi intensif terkait studi kelayakan teknis dan finansial. Diperlukan sinergi yang kuat antarinstansi untuk memastikan kelancaran proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis.



Gambar 3. Usulan Rute Kereta Cepat Jakarta - Surabaya
Sumber: KCIC

Penyusunan Peraturan Pemerintah menjadi prioritas utama sebagai landasan hukum proyek ini. Selain itu, pemerintah akan melakukan kajian dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang komprehensif untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

4. Reorientasi Fokus PT PELNI

PT PELNI memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas maritim, khususnya di kawasan timur Indonesia. Sebagai perusahaan pelayaran nasional, PELNI diharapkan menjadi ujung tombak penghubung wilayah kepulauan di Indonesia. Sebagian besar armada PELNI telah melewati batas usia operasional teknis, yaitu 30 tahun. Kondisi ini menimbulkan risiko kerusakan mesin yang lebih tinggi dan berpotensi menyebabkan kecelakaan. Di sisi lain, kapasitas angkut PELNI belum optimal dalam memenuhi permintaan pada saat *peak season*.

Tabel 3. Kapasitas Angkut Nasional Kapal PELNI per 2024

Jenis Armada	Jumlah Unit yang Beroperasi	Kapasitas Penumpang
Kapal PELNI	26	50.493
Kapal Perintis	107	38.966
Kapal Swasta	1.208	151.042
Total Kapasitas Angkut Nasional	1.341	241.304

Sumber: Paparan PT PELNI pada Kunker Menko Infrawil 29 Desember 2024

Dalam menghadapi tantangan tersebut, fokus utama PELNI adalah pengadaan dua kapal baru dan peremajaan 12 kapal yang telah melewati batas usia teknis. Upaya ini sejalan dengan pengembangan industri perkapalan dalam negeri yang mendukung kemandirian maritim.

Rencana Tindak Lanjut Strategi jangka panjang meliputi penguatan industri galangan kapal nasional, pengembangan rute pelayaran multiport di wilayah Indonesia Timur, serta modernisasi sistem operasional PELNI untuk meningkatkan efisiensi layanan.

5. Transportasi Massal Bali

Trans Metro Dewata (TMD) merupakan sistem transportasi massal di Bali yang beroperasi berdasarkan skema *Buy The Service* (BTS). Sejak diluncurkan pada 2019, TMD telah berkontribusi signifikan dalam mendukung mobilitas masyarakat Bali. Melayani enam koridor perjalanan dengan total panjang trayek 311,9 km, 105 armada Siap Guna Operasi, dan rata-rata melayani 4.660 penumpang per hari sepanjang 2024.

Tabel 4. Koridor, trayek, dan armada Trans Metro Dewata

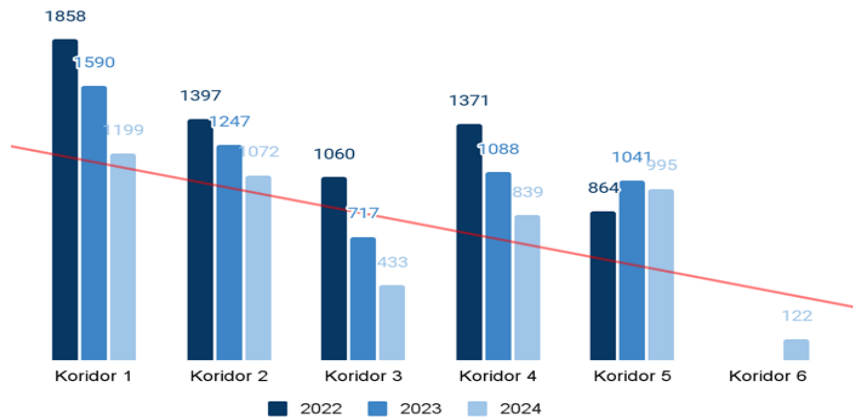
KORIDOR	PANJANG TRAYEK (KM)	JUMLAH ARMADA	
		SGO	SO
K1 (Sentral Parkir Kuta - Terminal Persiapan Tabanan)	60,3	20	18
K2 (Terminal Ubung - Bandara Ngurah Rai)	46	20	18
K3 (Terminal Ubung-Icon Bali Mall)	35,2	13	12
K4 (Terminal Ubung-Monkey Forest)	61,3	19	17
K5 (Sentral Parkir Kuta-Politeknik Negeri Bali)	61,6	19	17
K6 (Sentral Parkir Kuta-Nusa Dua)	47,5	14	13
TOTAL	311,9	105	95

Catatan:

- SGO (Siap Guna Operasi);
- SO (Siap Operasi).

Sumber: Dishub Bali, 2025

Operasional TMD terhenti pada Januari 2025 karena Pemprov Bali belum dapat mengalokasikan anggaran. Keterbatasan kelembagaan dan kesiapan finansial menjadi hambatan utama bagi keberlanjutan program ini. Pembahasan Koordinasi antara Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan Pemprov Bali terus dilakukan untuk mencari solusi pendanaan. Skema BTS diharapkan dapat terus dijalankan dengan dukungan dari pemerintah pusat, sehingga TMD dapat kembali melayani masyarakat secara optimal.

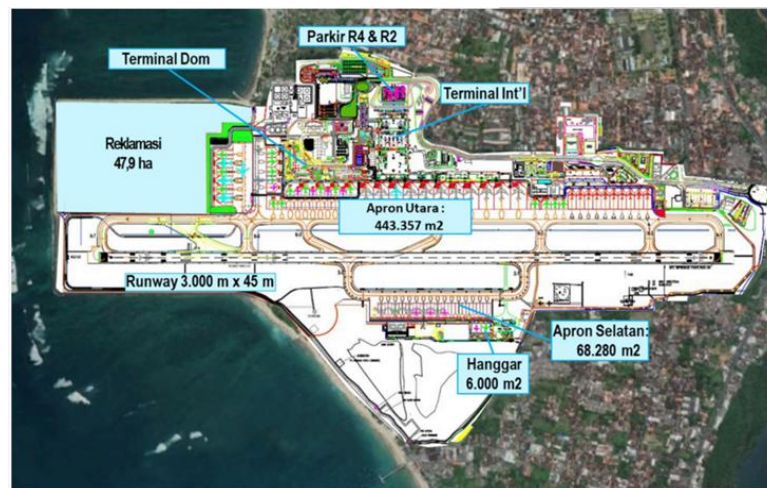


Gambar 4. Rerata penumpang yang dilayani oleh Trans Metro Dewata per tahun
Sumber: Dishub Bali, 2025

Rencana Tindak Lanjut adalah mengupayakan komitmen pendanaan dari Pemprov Bali, mengembangkan kelembagaan yang mendukung operasional transportasi massal, dan memastikan keberlangsungan program BTS untuk meningkatkan konektivitas di Bali.

6. Revitalisasi Bandara Ngurah Rai

Bandara I Gusti Ngurah Rai mengalami kelebihan kapasitas yang diperkirakan terus meningkat hingga 2044. Revitalisasi diperlukan untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan penumpang. Fasilitas terminal yang ada belum memadai untuk menghadapi lonjakan penumpang di masa depan, dengan proyeksi mencapai lebih dari 30 juta penumpang pada 2029.



Gambar 5. Rencana Pengembangan Fasilitas Terminal Bandara DPS

Sumber: Angkasa Pura

Perluasan terminal dan transformasi manajemen pelayanan bandara menjadi fokus utama. Modernisasi sistem layanan termasuk integrasi teknologi akan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi.

Rencana tindak lanjut melaksanakan pengembangan fasilitas terminal dan integrasi manajemen layanan yang lebih baik, termasuk kolaborasi dengan pihak swasta untuk peningkatan kapasitas layanan.

7. Persiapan Bali International Air Show 2025

Event Bali International Air Show (BIAS) 2025 diharapkan dapat mendorong investasi di sektor kedirgantaraan, memperkuat konektivitas internasional, dan meningkatkan posisi Indonesia dalam industri aviasi global. Event ini direncanakan akan diselenggarakan kembali pada tahun 2025.

Belum terbentuknya panitia nasional yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaan BIAS 2025 menjadi kendala utama dalam persiapan event ini. Penyusunan Keputusan Menko untuk membentuk panitia nasional tengah berlangsung. Koordinasi antarinstansi perlu ditingkatkan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan.

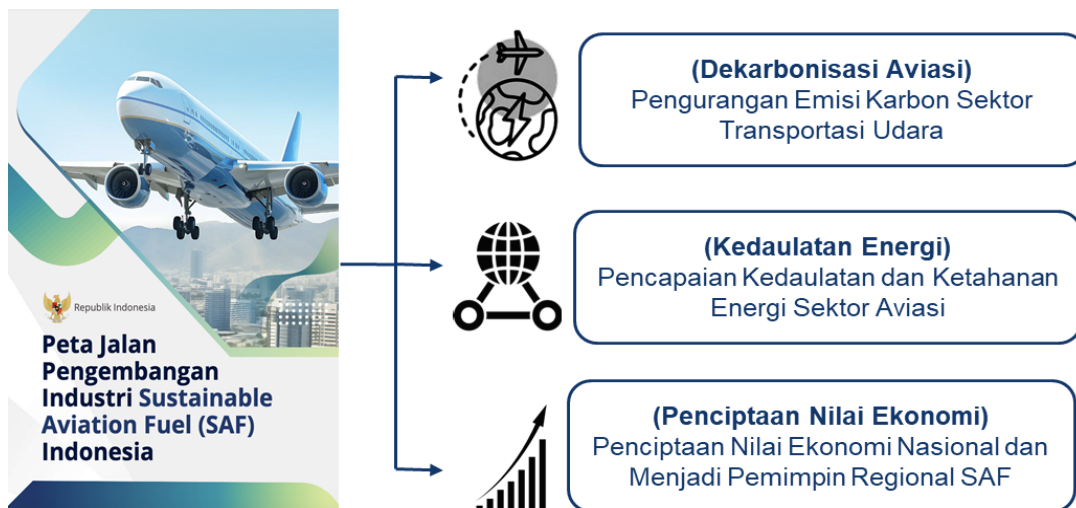
Rencana Tindak Lanjut memfasilitasi koordinasi lintas kementerian, menyusun Keputusan Menko, dan memastikan kesiapan infrastruktur dan promosi untuk mendukung suksesnya BIAS 2025.



Gambar 6. Bali International Airshow (BIAS) 2025
Sumber: BIAS Organizers, 2024

8. Sustainable Aviation Fuel (SAF)

Sebagai bagian dari komitmen pengurangan emisi CO₂ sebesar 2,6 gigaton hingga 2040, Indonesia telah meluncurkan peta jalan pengembangan SAF pada 2024. Pengembangan SAF menghadapi tantangan dalam pengamanan bahan baku, kesiapan teknologi, dan perlunya strategi advokasi bahan baku turunan sawit.



Gambar 7. Peta Jalan dan Tiga Tujuan Utama Pengembangan SAF Indonesia

Peta jalan SAF difokuskan pada dekarbonisasi aviasi, peningkatan kedaulatan energi, dan mendorong ekonomi nasional. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan implementasi. Rencana Tindak Lanjut Membentuk satgas rencana aksi, mengamankan bahan baku, dan menyusun strategi advokasi yang melibatkan pemangku kepentingan dari sektor energi, lingkungan, dan industri.

B. Realisasi Anggaran

Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas pada 2024 melanjutkan pagu anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Setelah dilakukan *trilateral meeting* dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan, penggunaan anggaran Kemenko Kemaritiman dan Investasi selesai pada 20 Oktober 2024. Selanjutnya per 21 Oktober 2024 penggunaan anggaran masuk ke realisasi Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Tingkat penyerapan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan per program sampai dengan Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp40.059.206.723,00 (empat puluh miliar lima puluh sembilan juta dua ratus enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) dari total pagu sebesar Rp45.964.915.758,00 (empat puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) atau 87%.

Adapun detail realisasi anggaran per program terlihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Realisasi Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas Tahun 2024

No	Nama Program/Kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Pagu Oktober s.d Desember	Realisasi (Rp)	%
1	Program Dukungan Manajemen	213.479.391.000	36.481.840.307	31.157.284.399	85%
2	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	97.244.547.000	9.483.075.451	8.901.922.324	94%
2.1	Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	40.922.889.000	3.234.690.918	3.075.576.962	95%
2.2	Koordinasi Sumber Daya Maritim	11.528.105.000	1.322.351.909	1.220.805.791	92%
2.3	Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	10.482.292.000	986.904.894	815.040.380	83%
2.4	Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	11.239.974.000	778.666.289	736.330.891	95%
2.5	Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	11.219.974.000	1.275.855.765	1.199.556.213	94%
2.6	Koordinasi Investasi dan Pertambangan	11.851.313.000	1.884.605.676	1.854.612.087	98%
Jumlah		310.723.938.000	45.964.915.758	40.059.206.723	87%

Sumber: Aplikasi, OM SPAN, (Cetak Desember 2024) diolah

Realisasi anggaran Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas menggunakan DIPA Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp1.199.556.213 dari pagu anggaran sebesar Rp1.275.855.765 dengan capaian sebesar 94%. Realisasi tertinggi pada Deputy Bidang Investasi dan Pertambangan sebesar 98%. Sementara realisasi anggaran terendah pada Deputy Bidang Infrastruktur dan Transportasi sebesar 83%.

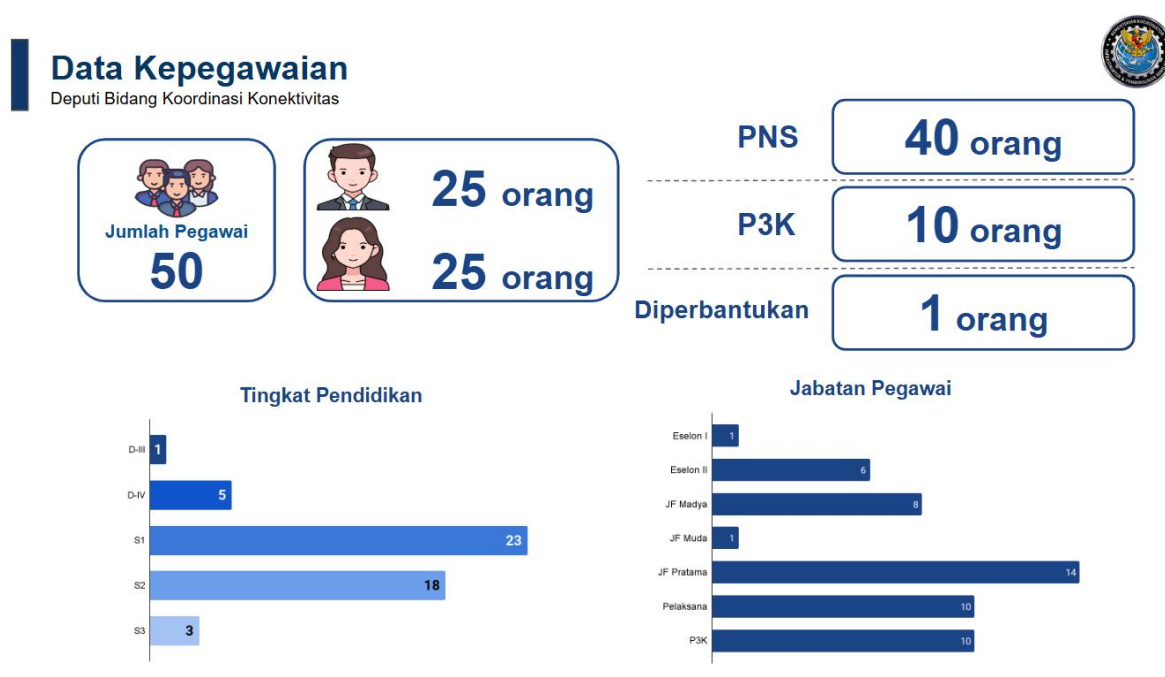
Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas merupakan unit kerja dengan serapan anggaran kedua tertinggi dibanding unit kerja lain di lingkup Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan administrasi keuangan pada akhir 2024 diprioritaskan pada penyelesaian berkas keuangan pada masa Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta dukungan perjalanan dinas Menteri Koordinator. Selain itu, proses pembukaan anggaran pada masa Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga tidak banyak kesempatan untuk melakukan realisasi anggaran.

C. Kondisi Sumber Daya Pegawai

Pegawai Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas sebagian besar berasal dari Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Berdasarkan pelantikan dan penetapan pegawai oleh Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi, pegawai Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas berjumlah 50 orang pegawai dengan komposisi satu orang Pejabat Tinggi Madya, enam orang Pejabat Tinggi Pratama, delapan orang Pejabat Fungsional Madya, satu orang Pejabat Fungsional Muda, 14 orang

Fungsional Pertama, 10 orang Pelaksana, dan 10 orang Tenaga Kerja Kontrak yang sedang mengikuti seleksi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Berdasarkan komposisi pegawai, terdiri dari 40 orang PNS dan 10 orang P3K dengan perbandingan gender yang sama, 25 orang laki-laki dan 25 orang perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai berlatar belakang S-1 (23 orang), S-2 sebanyak 18 orang, S-3 tiga orang, D-IV lima orang, dan D-III satu orang.



Gambar 8. Rekapitulasi Pegawai Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas

Hingga akhir 2024 terdapat tiga orang pegawai Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas yang sedang menjalani Tugas Belajar, yaitu:

Tabel 6. Daftar Pegawai yang menjalani Tugas Belajar

No	Nama	NIP	Jabatan	Keterangan Studi
1	Meisela Majid	199205262019012001	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	Wageningen University; Tourism, Society and Environment
2	Ambar Puji Cahyaningsih	199501142019012001	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Victoria University of Wellington; Public Policy
3	Fauzan Fathur Rachman	199608172020121001	Penelaah Teknis Kebijakan	Oxford Brookes University; Master of Hospitality, Events, and Tourism

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Laporan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas Tahun 2024 menyajikan informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan pelaksanaan Quick Wins Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada periode Oktober s.d Desember 2024.
2. Pada periode tahun 2024 pelaksanaan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas belum mengacu pada sasaran program dan indikator kinerja dokumen Perjanjian Kinerja (PK), karena belum ada penetapan dokumen PK dan Renstra Deputy maupun Kementerian.
3. Selama periode Oktober s.d Desember 2024, Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas telah berhasil mendorong penyelesaian quick wins dan isu strategis bidang konektivitas bersinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait.
4. Isu strategis yang diselesaikan meliputi persiapan moda angkutan natal dan tahun baru, penurunan harga tiket pesawat, rencana kereta cepat Jakarta-Surabaya, transportasi massal di Bali, persiapan penyelenggaraan Bali International Air Show 2025, tindak lanjut peta jalan pengembangan industri bahan bakar penerbangan berkelanjutan, dan revitalisasi Bandara I Gusti Ngurah Rai.
5. Realisasi anggaran Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas sebesar Rp1.199.556.213 dari pagu anggaran sebesar Rp1.275.855.765 dengan capaian sebesar 94%.

B. Langkah Perbaikan Kedepan

Untuk perbaikan di masa mendatang, maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Memperkuat koordinasi dengan K/L dan instansi terkait yang berada di bawah koordinasi Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas melalui penyelarasan visi, misi, dan program serta isu strategis..
2. Menyusun perencanaan kinerja baik jangka pendek melalui Perjanjian Kinerja tahunan dan perencanaan jangka menengah melalui dokumen Renstra 2025-2029 yang mengacu pada dokumen RKP 2025 dan RPJMN 2025-2029.
3. Menyusun sasaran program, indikator kinerja, dan target kinerja yang spesifik, terukur, dan ideal. Selanjutnya agar disusun rencana aksi yang terukur dan konkret sebagai upaya mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

4. Melaksanakan evaluasi terhadap capaian kinerja secara berjenjang dan berkala setiap triwulan melalui evaluasi internal dan melibatkan stakeholder terkait. Evaluasi dilakukan merujuk pada rencana aksi yang sudah ditetapkan.
5. Penguatan tata kelola kelembagaan melalui penguatan kelompok kerja pembangunan zona integritas dan penetapan agen perubahan untuk mewujudkan Deputy Bidang Konektivitas menjadi unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 2025.
6. Terkait bidang tugas baru penyelesaian isu konektivitas maka pimpinan Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas selalu memfasilitasi seluruh pegawai untuk mempelajari isu melalui berbagai bentuk khususnya diskusi dengan pemangku kepentingan, misalnya Kementerian Perhubungan dan Bappenas.